

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan pedesaan layaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui program-program yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Sari, 2014).

Pelaksanaan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk menanggulangi kemiskinan selama ini belum pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Program pemberdayaan atau penanggulangan kemiskinan baik yang diprakarsai oleh Pemerintah Pusat maupun yang bermitra dengan Pemerintah Daerah yang menerapkan program pemberdayaan sampai saat ini belum ada menunjukkan tentang peningkatan atau sustainabilitas keberdayaan penduduk/masyarakat setelah program itu dilaksanakan. Sejauh ini yang menguatkan penilaian tentang sustainable nya adalah programnya, bukan tingkat keberdayaan kelompok sarannya (Firmansyah, 2012).

Banyak program yang diberikan pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa. Pada umumnya program atau proyek yang diberikan kepada desa sebagai salah satu program pemberdayaan berupa bantuan fisik baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan listrik dan air bersih dan sebagainya. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, namun ancaman tentang

meningkatnya kemiskinan masih tetap harus diwaspadai. Ketimpangan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di seluruh wilayah yang terjadi selama ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah juga menjadi sangat rentan. Akibatnya, dampak masalah ketimpangan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat tersebut menimbulkan problem kemiskinan yang berkepanjangan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui sejauh mana suatu program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, maka sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi model-model program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan penguatan kelembagaan (Murdiansyah, 2014).

Namun pada kenyataan sebagian besar program atau proyek yang dilaksanakan itu tidak mencapai tujuan dan bahkan tidak berkelanjutan. Berbagai program yang dijalankan pemerintah lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan. Program yang dilakukan tersebut banyak mengalami kegagalan dikarenakan pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga menjadikan program atau proyek tersebut mengalami kegagalan. Selain itu masyarakat desa yang masih sangat tradisional dan memiliki tingkat pengetahuan yang rendah karena tingkat pendidikan yang rendah yang ada di desa-desa menyebabkan masyarakat desa sulit untuk memahami program pemberdayaan itu sendiri.

Pada dasarnya keberhasilan atau kegagalan suatu program di Desa sangat ditentukan oleh kinerja dari Kepala Desa, yang mana dilihat dari sejauh mana Kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya manajemen atau sebagai manajer dalam fungsi manajemen. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan desa dimana kepala desa yang merupakan pemimpin formal di desa serta memiliki tugas dan

kewajiban dalam menyelenggarakan tugas dan urusan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa yang dinyatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sari, 2014).

Program pemberdayaan seharusnya lebih mengarah pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan suatu desa melalui program-program untuk pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat diperlukan dukungan dari tatanan pemerintah yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama (Sari, 2014).

Menurut Murdiansyah (2014), Mengevaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat setidaknya diarahkan sebagai berikut :

1. Menyusun pola penguatan kelembagaan dan manajemen usaha ekonomi masyarakat yang efektif melalui pendekatan kelompok usaha
2. Menyusun rekomendasi bagi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang efektif di Kalimantan Barat.
3. Menyusun *training design* bagi tokoh-tokoh riil dalam masyarakat.

Rekomendasi yang diharapkan dari evaluasi ini adalah rancangan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien serta langkah-langkah strategis implementasinya di untuk masa mendatang. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat digunakan untuk menyusun program-program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat secara lebih tepat, efektif, dan efisien (Murdiansyah, 2014).

Ella hulu adalah salah satu desa yang tingkat perekonomiannya dan pendidikannya masih sangat rendah. Masyarakat desa Ella Hulu masih sangat mengandalkan bertani untuk mendapatkan penghasilan. Sebagian besar masyarakat Desa Ella Hulu bekerja dibidang petani karet dan sawah. Desa Ella Hulu memiliki program pemberdayaan masyarakat yaitu Program Kebun Bibit Rakyat atau KBR. Program pemberdayaan berupa Bantuan Bibit, namun sayangnya program tersebut sebagian besar gagal dan tidak berlanjut lagi hingga sekarang. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat desa menjadi salah satu faktor penyebab tidak berjalannya program tersebut dikarenakan sebagian masyarakat desa banyak yang tidak memiliki pendidikan yang dikatakan cukup baik. Serta tidak memiliki ketampilan yang mendukung, seperti tidak mengerti tentang bagaimana menggunakan teknologi modern seperti sekrang ini. Kemudian tidak adanya penyuluhan dan pelatihan bagi para petani karet tentang bagaimana mengolah bibit tersebut.

Setiap program pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, mengapa program yang dirancang untuk mensejahterakan masyarakat ini tidak membuahkan hasil ? hal ini tentunya menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan mengajukan penelitian tentang **“Faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa tahun 2016-2017”**, yang dilakukan di Desa Ella Hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

“Faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat di desa Ella Hulu pada tahun 2016-2017 ?”

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab kegagalan dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Ella Hulu

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi akademisi jurusan ilmu pemerintahan mengenai kajian tentang faktor kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa serta menambah bahan bacaan bagi peneliti.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, saran, ataupun masukan serta dapat dijadikan bahan kajian bagi semua pihak terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Studi terdahulu

Studi terdahulu akan menjadi salah satu acuan dalam melakukan suatu penelitian yang akan dijadikan sebagai materi tambahan serta dapat digunakan untuk memperkaya suatu teori dalam mengkaji penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Hasil penelitian dari Aziz Muslim tahun 2017 tentang Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Penelitian ini mengungkapkan bahwa penanganan masalah kemiskinan di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah dengan melalui beberapa program, diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Seperti yang kita ketahui bahwa program inipun telah berjalan cukup lama, sebelum akhirnya ditutup karena program tersebut telah dianggap gagal dalam melaksanakan perannya dalam membangun masyarakat miskin. Hasil menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut yaitu buruknya kinerja fasilitator serta kesalahan prosedur program, yang bekerja secara pragmatis yang mengejar hasil tetapi tidak menjalankan peran, tugas, dan fungsinya dengan baik.

Hasil penelitian dari Josmar Lombok Banjar Nohor tahun 2010 tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan dan Keberhasilan Pengelolaan Sistem Penyediaan Sistem Air Minum di Desa Wuran dan Teransing Kabupaten Barito Timur. Berdasarkan hasil analisis dari Josmar, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di desa Wuran yaitu ditentukan dari karakteristik masyarakat, penentuan lokasi bangunan yang tidak tepat,

kemudian tingkat kehadiran rapat dan iuran operasional yang tidak beroperasi dengan baik sehingga menyebabkan program air minum mengalami kegagalan di Desa Wurun. Dalam mengatasi kegagalan tersebut sangat diperlukan partisipasi masyarakat khususnya dalam tahap perencanaan program air minum, kemudian menyiapkan aturan-aturan kerja operasional dan sumber pembiayaan.

Hasil Penelitian dari Basri tahun 2015 tentang Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Inovasi (studi kasus pada Program Budi Daya Lele Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Menurut hasil penelitian dari Basri, penyebab gagalnya program pemberdayaan masyarakat melalui budi daya lele yaitu, disebabkan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan-kelemahan tersebut terdapat pada tahap penyampaian yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran penyuluhan, tidak adanya pelatihan terhadap sasaran program, kurangnya peran aktif dari pembina program dalam melayani dan membantu peserta program, tidak adanya pendampingan untuk mengawasi berlangsungnya program tersebut. Seharusnya pada tahap penyampaian semua pihak harus diberi informasi sejelas-jelasnya mengenai program tersebut, supaya terhindar dari ketidaktepatan sasaran. Kemudian seharusnya sebelum melaksanakan program pemberdayaan masyarakat harusnya diberi pelatihan terlebih dahulu. Untuk memaksimalkan program harus ada pendamping yang mengawasi berjalannya program tersebut.

Hasil penelitian dari Eni Maryanti dan Zulkarnaini tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa. Hasil penelitian Eni dan Zulkarnaini menyatakan bahwa penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa adalah pertama, ketakutan yang dimiliki masyarakat desa yang akan diberdayakan. Kedua, ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat yang akan diberdayakan, karena harus merubah kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat desa. Ketiga, kecenderungan menggunakan kebijakan yang sama. Faktor kegagalan pelaksanaan program pemberdayaan desa melalui program UEK/D dapat

disimpulkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi kegagalan adalah faktor kecenderungan menggunakan kebijakan yang sama. Hal ini terjadi karena pihak pengelola program sangat kaku dalam melaksanakan program ini kepada masyarakat calon peminfaat program. Dimana setiap masyarakat miskin yang ingin memanfaatkan program UEK/D harus memenuhi kriteria dan persyaratan terlebih dahulu baru bisa memanfaatkan program.

Hasil penelitian dari Atma Ras tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. Hasil penelitian Atma mengatakan bahwa faktor penyebab kegagalan pengentasan kemiskinan adalah pertama cenderung berfokus pada program bantuan sosial untuk orang miskin hal tersebut justru tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan, justru akan memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin, sehingga menjadikan mereka sebagai orang yang bergantung pada pemerintah. Kedua, kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan. Ketidakterhasilan dalam pengentasan kemiskinan selain disebabkan faktor bantuan sosial yang tidak mendidik masyarakat miskin, juga cara pemahaman masyarakat yang selalu didasarkan pada pemikiran Neo-klasik bahwa kemiskinan disebabkan oleh kondisi ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan politik masyarakat.

Hasil penelitian Muslim tahun 2013 tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pelaksanaan Fisik Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Padang. Menurut Muslim yang menjadi faktor dalam mempengaruhi keterlambatan program nasional pemberdayaan masyarakat adalah pengendalian dampak lingkungan dan administrasi serta waktu pelaksanaan, pengawasan volume kerja, serta penyediaan alat-alat dan bahan mentah. Tidak ada pengawasan dalam melaksanakan program menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kota Padang.

Hasil penelitian dari Gerakan Anti-Kemiskinan Rakyat (GAPRI) oleh Ramadhani tahun 2013 tentang PNPM gagal tekan kemiskinan di Desa, menemukan bahwa program

PNPM sama sekali belum menyentuh akar persoalan kemiskinan. Selama ini proyek PNPM hanya sebatas proyek pembangunan jalan, jembatan, dan rumah saja. Namun, yang menikmati semua program tersebut bukan masyarakat pedesaan melainkan masyarakat menengah-atas yang memiliki kendaraan. PNPM Mandiri juga tidak berhasil meningkatkan produksi pertanian, padahal seharusnya pertanian adalah sektor yang harus didukung jika ingin mengurangi angka kemiskinan di desa-desa. Untuk menanggulangi kemiskinan di desa, desa harus diberi wewenang untuk mengatur sendiri kemandiriannya. Selama ini pemerintah dinilai keliru dalam menetapkan kebijakan dalam memberi bantuan dari pusat dan seharusnya desa sendiri yang membangun.

Hasil penemuan pada artikel Kumparan.com oleh Kamaruddin Azis tentang Mengapa Banyak Program Pemberdayaan di Pesisir gagal tahun 2017 mengatakan bahwa faktor penyebab kegagalan tersebut adalah tidak konsistennya fasilitator yang bekerja. Fasilitator yang datang menawarkan akan membantu setiap persoalan yang dialami oleh masyarakat. Hal tersebut menjadikan masyarakat bukannya berdaya tetapi malah ketergantungan meminta bantuan pada pemerintah. Pemerintah diminta bersifat transparan dalam mengeluarkan anggaran dan serta membeli barang sesuai yang telah direncanakan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat kurang mengapresiasi peran, pengetahuan serta pengalaman mereka.

Hasil temuan pada artikel kompas.com oleh Nina Susilo yang berjudul kegagalan program PNPM pada tahun 2012 mengatakan penyebab kegagalan tersebut adalah dikarenakan tidak adanya dana pendamping. Sementara untuk memberdayakan masyarakat desa diperlukan dana yang cukup besar.

Hasil temuan Danang Pamungkas pada artikel Partai Rakyat Pekerja dengan judul Problem Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2017 mengatakan bahwa penyebab dari problem nya adalah kegiatan-kegiatan yang selalu bersandar pada

anggaran yang besar. Padahal anggaran dana yang besar saja tidak cukup untuk membebaskan masyarakat miskin dari ketidakberdayaan. Selama ini pemberdayaan selalu berbasis amplop. Bahkan pada saat kegiatan pemberdayaan berlangsungpun amplop disini menjadi peran penting, agar masyarakat mau datang.

Pada penelitian terdahulu terdapat 4 faktor penyebab yang sangat berbeda yaitu pertama, masyarakat desa yang tidak berpartisipasi ketika rapat dengan fasilitator yang hendak memberi penyuluhan. Kedua, ada masyarakat desa yang takut untuk diberdayakan. Padahal sudah jelas dengan adanya program pemberdayaan bukan untuk menyusahkan masyarakatnya tetapi untuk menyejahterakan masyarakat miskin. Ketiga, bergantung pada pemerintah. Pemerintah hanya memberikan program pada masyarakat desa serta bantuan dan fasilitator untuk memberikan penjelasan.

Selanjutnya masyarakat desalah yang harus mengelola program tersebut dengan tujuan memandirikan masyarakat desa. Keempat, yang menikmati program dari kalangan atas. Padahal sudah jelas tujuan dari pemberdayaan yaitu untuk menyejahterakan masyarakat miskin pedesaan. Dengan kata lain pemerintah seharusnya memberikan program kepada masyarakat yang benar-benar perlu untuk diberdayakan. Kelima, tidak adanya dana pendamping. Dana yang diberikan pemerintah harusnya sudah lebih dari cukup untuk masyarakat desa mengelola program yang diberikan pemerintah. Dengan seperti itu masyarakat jadi lebih berusaha untuk membuat mereka berdaya dengan usaha mereka sendiri.

Tabel 1.1

Studi terdahulu tentang Faktor Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa di Beberapa Desa di Indonesia

Identitas Penulis	Faktor Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Solusi Dari Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat
<p>Aziz Muslim (2017) tentang Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur)</p>	<p>Penyebab dari kegagalan program PNPM berdasarkan hasil penelitian Aziz adalah akibat buruknya kinerja fasilitator serta kesalahan prosedur program yang bekerja secara pragmatis yang bekerja dengan menargetkan hasil yang baik tetapi tidak menjalankan peran, tugas seerta fungsinya dengan baik.</p>	<p>Manargetkan suatu program agar berhasil memang penting, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa menjalankan peran, tugas dan fungsi dari suatu program itu juga sangat penting sebagai penentu sejauh mana program itu berjalan. Program itu ada untuk membantu masyarakat mandiri dengan sendirinya.</p>
<p>Josmar Lombok Banjar Nohor (2010) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan dan Keberhasilan Pengelolaan Sistem Penyediaan Sistem Air Minum di Desa Wurun dan Teransing Kabupaten Barito Timur</p>	<p>Yang menjadi pengaruh terhadap gagalnya program pengelolaan air bersih di Desa Wulan yaitu karakteristik masyarakat yang buruk, penentuan lokasi yang tidak tepat, kemudian tidak ada partisipasi masyarakat saat adanya rapat yang menjadikan tingkat partisipasi rendah, serta iuran operasional yaang tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan program air bersih di Desa Wulan mengalami kegagalan.</p>	<p>Dalam mengatasi kegagalan program air minum di Desa Wulan sangat diperlukan partisipasi yang aktif dari masyarakatnya khususnya dalam tahap perencanaan, baru kemudian menyiapkan aturan kerja operasional serta sumber pembiayaan program tersebut.</p>
<p>Basri (2015) tentang Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau</p>	<p>Kegagalan program pemberdayaan masyarakat pada Program Budi daya Lele dikarenakan adanya</p>	<p>Seharusnya pada tahap penyampaian semua pihak diharuskan diberi informasi terlebih</p>

<p>Dari Proses Inovasi (studi kasus pada Program Budi Daya Lele Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)</p>	<p>kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan pelaksanaan tersebut terdapat pada tahap penyampaian yang mengakibatkan ketidaktepatan sasaran penyuluhan, tidak adanya pelatihan terhadap sasaran program, kurangnya peran aktif dari pembina program dalam melayani dan membantu peserta program, serta tidak ada pendamping untuk mengawasi berlangsungnya program.</p>	<p>dahulu dengan sekejelas-jelasnya mengenai program tersebut. dan harusnya diberi pelatihan dulu sebelum melaksanakan program pemberdayaan.</p>
<p>Eni Maryanti dan Zulkarnaini (2014) tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	<p>Faktor penyebabnya adalah dikarenakan masyarakatnya sendiri takut untuk diberdayakan. Sehingga mereka berfikir bahwa jika pemerintah memberdayakan masyarakat desa akan merubah kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka lakukan sehari-hari.</p>	<p>Masyarakat harusnya mau berusaha untuk mengikuti perubahan dari adanya pemberdayaan. Terlebih lagi pemberdayaan itu diadakan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat miskin. Dengan artian merubah kebiasaan menjadi lebih baik lagi kedepannya.</p>
<p>Atma Ras (2013) tentang Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan</p>	<p>Yang mempengaruhi kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa adalah program yang cenderung berfokus pada bantuan sosial yang ditujukan untuk orang miskin. Yang pada akhirnya justru malah memperburuk moral dan perilaku masyarakat desa yang akan semakin ketergantungan dengan mengharapakan bantuan dari pemerintah</p>	<p>Pemerintah harus membiarkan masyarakatnya sendiri yang mengatur dan memberi wewenang tentang pengelolaan program. Agar masyarakat bisa lebih mandiri.</p>
<p>Muslim (2013) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pelaksanaan Fisik Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri</p>	<p>Faktor yang mempengaruhi keterlambatan program fisik pemberdayaan di Kota Padang adalah pengendalian dampak lingkungan dan administrasi serta waktu pelaksanaan, pengawasan volume kerja serta penyediaan alat-alat kerja.</p>	<p>Untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh semua pihak, pemberdayaan harus dilakukan pengawasan setiap prosesnya serta disediakan alat-alat untuk mempermudah pengerjaan program.</p>

Perkotaan di Kota Padang		Sehingga mempersingkat waktu pengerjaannya.
Koran Tempo oleh Ramadhani (2013) tentang PNPM gagal tekan kemiskinan di Desa, menemukan bahwa program PNPM sama sekali belum menyentuh akar persoalan kemiskinan.	Yang menjadi penyebab kegagalan program PNPM di desa adalah dikarenakan program PNPM hanya sebatas program pembangunan, infrastruktur serta rumah. Dimana yang dapat menikmati semua fasilitas itu adalah kalangan menengah atas yang mempunyai kendaraan.	Untuk membangun program pemberdayaan yang tepat dan sesuai sasaran haruslah sesuai dengan keadaan kondisi di desa-desa, yaitu dengan mendirikan program untuk para petani dan perempuan miskin yang ada didesa.
Kumaran.com oleh Kamaruddin Azis (2017) tentang Mengapa Banyak Program Pemberdayaan di Pesisir gagal	Penyebabnya adalah dikarenakan fasilitator yang tidak konsisten dalam bekerja. Disini artinya fasilitator harusnya menjadi golongan netral dimana hanya mendengarkan permasalahan yang ada di masyarakat dan kemudian membantu mengambil keputusan saat sedang rapat. Bukan untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan secara langsung.	Fasilitator mempunyai fungsi untuk menjelaskan dan mengarahkan masyarakat tentang program serta membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan saja.
Kompas.com oleh Nina Susilo (2011) kegagalan program PNPM	Penyebab kegagalan program PNPM adalah dikarenakan tidak adanya dan pendamping untuk mengelola program PNPM.	Jika suatu desa benar-benar menginginkan kondisi masyarakat desanya menjadi lebih berdaya tentu mereka akan berusaha tanpa memikirkan berapa banyak dana yang diberikan pemerintah dan sebaik mungkin untuk mengelola dana tersebut.
Partai Rakyat Pekerja oleh Danang Pamungkas (2017) Problem Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Problemnya adalah dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat bersandar pada anggaran dana yang besar. Padahal hal itu tentu tidak menjamin suatu desa akan menjadi berdaya dikarenakan	Pemberdayaan itu sejatinya ditujukan kepada masyarakat miskin untuk memperkuat peran masyarakat dan memberikan peluang pada mereka untuk mengatasi masalahnya

	memiliki anggaran yang besar. Untuk mendatangkan warga saat mengadakan pemberdayaan saja diperlukan amplop.	sendiri. Bukan dengan memberikan amplop agar mereka mau datang pada saat pemberdayaan.
--	---	--

Tabel 1. Studi terdahulu tentang Faktor Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Beberapa Desa di Indonesia

Dari tabel diatas meskipun penelitian yang dilakukan penulis ada sedikit kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa . Namun disini ada sedikit perbedaan pada faktor utama penyebab kegagalan yaitu dimana faktor penyebab yang ditemukan penulis berdasarkan wawancara terkait kegagalan program pemberdayaan adalah masyarakat desa yang tidak memiliki keterampilan serta pengetahuan dalam menjalankan atau mengelola program.

1.6. Kerangka teori

1.6.1. Pemberdayaann Masyarakat

1.6.1.1. Pengertian pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Sari, 2014).meningkatkan pengetahuan,sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

Menurut Noor (2014) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dalam skala luas, tidak semata-mata mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi membangun mekanisme untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut. Sejalan dengan kosnep ini, pemerintah sebagai agen perubahan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada tiga arah tujuan, yaitu : (1). Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2). Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui penerapan langkah nyata, (3). Melindungi dan membela kepentingan masyarakat. Konsep pemberdayaan lahir sebagai antithesis terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada mayoritas rakyat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah secara konseptual kesemuanya sudah mengedepankan partisipasi masyarakat dan mengutamakan pemberdayaan dalam setiap langkah kegiatannya.

Sedangkan menurut Ellen (2017) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi sekarang yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan itu sendiri lebih menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya, mendorong, serta memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Dalam proses

pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang berkesangkutan. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Sedangkan menurut Mardikanto & Soebiato (dalam Muhamad, 2017) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dana atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Proses pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti luas. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam hal ini usulan masyarakat itu sendiri menjadi hal dasar bagi program pemberdayaan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak pembangunan nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan sendiri oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya menjadi fasilitator.

1.6.1.2. Tujuan pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Terkait dengan hal ini, pembangunan apapun pengertiannya yang diberikan kepadanya akan selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan terhadap mutu hidup manusia, baik itu secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial budayanya. Tujuan

pemberdayaan itu sendiri menurut Mardikanto & Soebiato (dalam Muhamad, 2017) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

a. Perbaikan pendidikan (*better education*)

Yang berarti bahwa pemberdayaan haruslah dirancang sebagai bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada : perbaikan materi, perbaikan metode, serta perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu dan hubungan fasilitator dan penerima manfaat.

b. Perbaikan aksesibilitas (*better accesibillity*)

Dengan menumbuh kembangkan semangat belajar seumur hidup yang diharapkan akan memperbaiki aksesibilitas, terutama pada informasi/inovas, sumber pembiayaan, penyedia produk, dan peralatan, lembaga pemasaran;

c. Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan adanya perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas diharapkan akan adanya tindakan-tindakan yang lebih baik lagi;

d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Perbaikan kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan terjadi tindakan yang semakin lebih baik;

e. Perbaikan usaha (*better business*)

Dengan adanya perbaikan disetiap kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki bisnis agar menjadi lebih baik lagi;

f. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan dilakukan perbaikan bisnis makan secara tidak langsung akan memperbaiki pendapatan masyarakat agar masyarakat menjadi berdaya dalam memenuhi kebutuhannya.

g. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Dengan dilakukannya perbaikan pendapatan maka akan lebih mudah untuk memperbaiki lingkungan (fisik & sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau bahkan pendapatan yang sangat terbatas.

h. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Dengan tingkat pendapatan dan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga & masyarakat;

i. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang semakin membaik dengan dukungan lingkungan (fisik & sosial), maka diharapkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

1.6.1.3. Faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan

Menurut Suyanto (dalam Muslim, 2017) salah satu penyebab kegagalan membangun kemandirian masyarakat adalah suatu kesalahan dalam menemui-kenali faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan faktor ekonomi atau rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut banyak faktor, seperti faktor budaya, faktor geografi, dan lain sebagainya, sehingga tidak mudah direncanakan. Sementara menurut Yasa (dalam Muslim, 2017) mengatakan bahwa faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat dikarenakan beberapa faktor :

- a. Terbatasnya keterampilan dan pengetahuan juga bisa menyebabkan berkurangnya peluang bagi orang miskin yang ingin mengikuti program. Karena dengan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dapat berpengaruh pada keberhasilan suatu program.
- b. Sikap petugas lapangan yang kurang serius dalam melakukan pendataan terhadap jumlah pendapatan yang didapat orang miskin dan menghasilkan banyak data yang

tidak valid. Hal ini menjadikan data rujukan yang dijadikan acuan program pemberdayaan menjadi tidak tepat sasaran, yaitu masyarakat miskin.

- c. Kecenderungan memilih sasaran atau lokasi yang memungkinkan keberhasilannya tinggi, sehingga berakibat pada pemilihan lokasi yang tidak tepat.
- d. Kurangnya bantuan fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga menjadi penghambat program pemberdayaan.

1.6.1.4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto dan Soebianto (2015: 167-168) menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. Tentang hal ini secara konseptual strategi sering dikaitkan dengan beragam pendekatan, seperti:

- a. Strategi sebagai suatu rencana

Sebagai suatu rencana, strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksana dari suatu kegiatan.

- b. Strategi sebagai suatu kegiatan

Sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, lembaga untuk tercapainya suatu tujuan yang diharapkan atau yang telah ditetapkan

- c. Strategi sebagai suatu instrumen

Sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua unsur pimpinan sebagai pedoman sekaligus alat pengendali kegiatan

d. Strategi sebagai suatu sistem

Sebagai suatu sistem strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan yang terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

e. Strategi sebagai pola pikir

Sebagai pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi dengan wawasan yang luas,serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, serta dibarengi dengan upaya-upaya untuk menutupi kelemahan-kelemahan guna mengantisipasi ancaman-ancaman penyebab kegagalan dari suatu kegiatan.

1.6.1.5. Indikator pemberdayaan masyarakat

Dalam hal ini indikator diperlukan untuk menunjukkan keadaan atau kondisi seseorang apakah berdaya atau tidak, sehingga saat pendamping sosial diberikan, maka program yang diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan penerima manfaat. Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan (Mardikanto dan Soebiato, 2015).

- a. Kebebasan mobilitas : kemampuan seseorang untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika masyarakat mampu berpergian sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas “kecil” : kemampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia mampu untuk membuat keputusan sendiri mengenai kebutuhan

- keluarganya sendiri tanpa meminta izin dari pasangannya terlebih dahulu; terlebih jika ia mampu untuk membeli kebutuhan sehari-hari menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas “besar” : kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder, tersier seperti tv, radio, dan pakaian keluarga. Sepertinya halnya indikator diatas, poin tinggi akan diberikan kepada individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin dengan pasangan terlebih dahulu dan dengan menggunakan uang sendiri.
 - d. Terlibat dalam keputusan rumah tangga serta mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama keluarga.
 - e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga mengenai hak keluarga.
 - f. Kesadaran hukum dan politik; setidaknya mengetahui salah satu nama pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama Presiden; yang terakhir mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum waris.
 - g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; seseorang akan dianggap berdaya apabila ia pernah terlibat kampanye atau melakukan protes bersama, misalnya terhadap suami yang memukuli istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan jabatan/kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
 - h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga; memiliki rumah, tanah, aset dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi apabila ia memiliki aspek-aspek tersebut secara mandiri atau terpisah dari keluarga dan pasangannya.

1.6.2. Masyarakat desa

1.6.2.1. Pengertian masyarakat desa

Masyarakat desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang telah diakui desa tersebut. Sebagian masyarakat pedesaan bekerja sebagai petani untuk mencukupi biaya hidup. Masyarakat desa biasanya memiliki hubungan yang sangat erat antararganya.

Masyarakat pedesaan atau desa dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dalam sistem kehidupan yang umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga hidup bertani. Masyarakat desa cenderung homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat, dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat pedesaan cenderung identik dengan gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka (Huzaini, 2014)

Menurut Sari (2014) desa sebagai kesatuan masyarakat kecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pada upaya untuk mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik (Sari, 2014).

1.6.2.2. Karakteristik masyarakat desa

Masyarakat pedesaan selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik mereka dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di daerah tertentu. Masyarakat desa juga ditandai dengan memiliki ikatan perasaan batin yang kuat antar sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat dan pada hakekatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri dimanapun ia hidup, serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota masyarakat lain, karenan warga desa memiliki anggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas keselamatan dan kebahagiaan bersama sebagai masyarakat desa (Huzain, 2014).

Yang menjadi ciri utama dari masyarakat pedesaan antara lain yaitu bahwa didalam masyarakat pedesaan antara warganya mempunyai hubungan batin yang erat dibandingkan dengan masyarakat pedesaan diluar batas wilayahnya, sistem kehidupan yang umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan, sebagian besar warga masyarakatnya hidup dari bertani, yang terakhir memiliki ciri homogen seperti dalam halnya mencari mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya.

Menurut Emile Durkheim (dalam Huzain, 2014) bahwa pemahaman mengenai masyarakat harus melibatkan beberapa bentuk solidaritas. Solidaritas dalam berbagai lapisan masyarakat bekerja seperti perekat sosial. Dalam hal ini dapat berupa nilai, adat-

istiadat, kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat. Durkheim membagi kelompok masyarakat kedalam dua bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis.

a. Solidaritas mekanis

Solidaritas yang dibangun antar sesama manusia yang didasarkan pada humanisme serta besarnya tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Solidaritas tersebut mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam membangun kehidupan yang harmonis antar sesama. Solidaritas mekanis merupakan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana. Dalam hal tersebut kelompok-kelompok masyarakat tinggal tersebar dan hidup terpisah dengan yang lainnya. Masing-masing mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa memerlukan bantuan atau kerja sama dengan kelompok lainnya. Masing-masing anggota pada umumnya dapat menjalani peran mereka sendiri.

Solidaritas mekanis adalah ciri yang menandai bagi masyarakat sederhana yang hidup terpisah dalam kelompok-kelompok kecil. Masyarakat ini juga terikat oleh kesamaan dan kesadaran yang kuat. Contoh solidaritas mekanis adalah masyarakat pedesaan yang masih tradisional yang umumnya mempunyai pekerjaan sebagai petani.

b. Solidaritas Organik

Solidaritas organik adalah bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks atau beragam yang telah mengenal pembagian kerja secara rinci. Dengan demikian muncul keahlian tertentu yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat yang mengakibatkan setiap golongan masyarakat tertentu saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat hidup secara mandiri tanpa

melakukan hubungan kerja sama dalam golongan lain masyarakat. Namun demikian kesadaran bersama masyarakat lain lemah.

Solidaritas originis merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja dan dipersatukan dengan saling ketergantungan satu sama lain. Tiap anggota menjalani peranan yang berbeda dan diantara peranan yang ada terdapat saling ketergantungan satu sama lain yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

1.7. Definisi Konsep

Definisi konseptual adalah suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan secara singkat, jelas dan tegas dari beberapa konsep yang diambil dari kerangka teori dalam sebuah penelitian. Definisi konseptual juga merupakan batasan penjelasan terhadap beberapa konsep agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan.

1.7.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kekuatan serta kemandirian kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan serta keterbelakangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi berdaya dan mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pemberdayaan sendiri bertujuan untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta menyejahterakan masyarakat miskin, sehingga terciptalah masyarakat yang berdaya dan mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

1.7.2. Masyarakat desa

Masyarakat desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan adat-istiadat yang memiliki hubungan mendalam serta erat didalam kehidupan berkelompok dengan dasar kekeluargaan yang sebagian besar hidupnya bertani. Masyarakat desa identik dengan gotong royong dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Karakteristik masyarakat desa dapat terlihat dari perasaan batin kuat yang mereka miliki kepada sesama warga desa lainnya, sehingga mereka tidak ragu untuk saling berkorban demi keselamatan dan kebahagiaan masyarakat desa lainnya.

1.8. Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan variabel-variabel tersebut yang dapat diamati. Proses perubahan definisi konseptual yang lebih menekankan kriteria hipotetik menjadi definisi operasional disebut dengan operasionalisasi variabel penelitian (Saifuddin, 2014: 74) dalam penulisan skripsi ini, definisi operasional mengacu pada indikator-indikator :

Faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan

- a. Rendahnya kinerja petugas lapangan.
- b. Pemilihan lokasi yang tidak tepat.
- c. Kurangnya bantuan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Terbatasnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat desa

1.9. Metode penelitian

Menurut Suryana (2010) metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.

1.9.1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang “faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa Ella Hulu tahun 2016” Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (Febriani, 2013) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode kualitatif berdasarkan pemahaman dan penafsiran makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi, menurut Imam Gunawan (2015).

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Melawi, tepatnya di desa Ella Hulu Kecamatan Manukung. Alasan pemilihan lokasi ini adalah dengan mempertimbangkan bahwa di Desa Ella Hulu memiliki permasalahan kurangnya pemberdayaan di desa tersebut serta banyak masyarakat yang hidupnya belum sejahtera.

1.9.3. Unit Analisis data

Dalam penelitian ini, unit analisis data dapat diartikan sebagai objek nyata yang diteliti, dengan maksud untuk mengetahui apa penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat desa di Ella Hulu. Maka unit analisis dalam hal ini adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi.

1.9.4. Jenis data

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder :

1.9.4.1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang secara khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

1.9.4.2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bisa dikatakan tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Data sekunder biasanya berbentuk data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

1.9.5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Wawancara dilakukan oleh peneliti di rumah informan Abet dan Usman selaku Kelompok Tani Desa Ella Hulu dan Bapak Wito Mulyono, S.IP, MM selaku KASUBAG Dinas Perkebunan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian